

Pemetaan Potensi Produk Unggulan Daerah sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis UMKM: Studi Kasus Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Mapping of Regional Superior Product Potential as a Local Economic Development Strategy Based on MSMEs: A Case Study of Bekasi Regency, West Java

Rizky Afnan Fadillah¹, Cahya Nur Hidayat², Fauziah³
Corresponding author : rizkyafnanf@gmail.com

INFO NASKAH

Riwayat Naskah :

Diterima April 2026

Diterima hasil revisi Mei 2026

Terbit Juni 2026

Kata Kunci :

produk unggulan daerah
ekonomi lokal

UMKM

Location quotient

Klaster industri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis potensi produk unggulan daerah (PUD) di Kabupaten Bekasi sebagai basis strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian dilaksanakan pada tahun 2024–2025 dengan menggunakan pendekatan mixed methods yang memadukan analisis deskriptif-kualitatif dan analisis kuantitatif melalui metode Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Shift Share Analysis (SSA). Data primer diperoleh melalui survei lapangan terhadap 248 unit UMKM yang tersebar di 23 kecamatan, sedangkan data sekunder bersumber dari data PDRB BPS Kabupaten Bekasi tahun 2020–2024. Hasil analisis LQ mengidentifikasi lima sektor dengan nilai $LQ > 1$, meliputi industri makanan olahan ($LQ = 1,61$), perdagangan produk lokal ($LQ = 1,35$), minuman herbal ($LQ = 1,31$), konveksi ($LQ = 1,19$), dan industri tahu-tempe ($LQ = 1,12$). Analisis DLQ mengonfirmasi bahwa sektor makanan olahan, minuman herbal, konveksi, kerajinan tangan, dan perdagangan lokal berpotensi menjadi sektor basis di masa depan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan klaster industri berbasis PUD, penguatan ekosistem UMKM melalui digitalisasi dan sertifikasi, serta penerapan model kolaborasi quadruple helix sebagai kerangka tata kelola pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kata Kunci: produk unggulan daerah; ekonomi lokal; UMKM; Location Quotient; klaster industri; Kabupaten Bekasi

ABSTRACT

This study aims to identify, map, and analyze the potential of regional superior products (PUD) in Bekasi Regency as a basis for MSME-based local economic development strategies. Conducted in 2024–2025, the study employs a mixed-methods approach combining descriptive-qualitative analysis with Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), and Shift Share Analysis (SSA). Primary data were collected from 248 MSME units across 23 sub-districts; secondary data were drawn from BPS Bekasi Regency GRDP data for 2020–2024. LQ analysis identified five sectors with $LQ > 1$: processed food (1.61), local trade (1.35), herbal beverages (1.31), garment/convection (1.19), and tofu-tempeh industry (1.12). DLQ and SSA confirm the competitive advantage and future growth potential of these sectors. The study recommends cluster-based industrial development, MSME ecosystem strengthening through digitalization, and a quadruple helix collaboration model for sustainable local economic governance.

Keywords: regional superior products; local economy; MSMEs; Location Quotient; industrial cluster; Bekasi Regency

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Bekasi, (email : rizkyafnanf@gmail.com)

²Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Bekasi, (email : cahyonur.jurnal@gmail.com)

³Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Bekasi

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan strategi yang berangkat dari keunggulan dan potensi lokal, bukan semata-mata bergantung pada investasi eksternal atau sektor formal berskala besar. Fenomena ketimpangan struktural ekonomi daerah—di mana pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu diikuti pemerataan kesejahteraan—mendorong perlunya reorientasi kebijakan menuju penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal (Kuncoro, 2018). Dalam kerangka ini, pemetaan Produk Unggulan Daerah (PUD) menjadi instrumen strategis yang dapat mengidentifikasi komoditas dan sektor lokal berpotensi tinggi sebagai penggerak ekonomi daerah.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah dengan dinamika ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data BPS (2024), PDRB Kabupaten Bekasi atas dasar harga berlaku mencapai Rp 310,2 triliun pada tahun 2023, dengan sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar (68,4%). Namun demikian, dominasi sektor industri manufaktur skala besar ini menciptakan ketergantungan struktural yang rentan terhadap fluktuasi investasi dan perubahan rantai pasok global. Di sisi lain, terdapat 89.742 unit UMKM yang tercatat di Kabupaten Bekasi (Dinas Koperasi dan UMKM, 2024), menyerap sekitar 156.300 tenaga kerja, namun belum memiliki peta potensi unggulan yang komprehensif sebagai dasar pengembangan kebijakan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis UMKM di Kabupaten Bekasi dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) belum tersedianya pemetaan potensi PUD yang sistematis dan berbasis data lintas sektor; (2) belum terbentuknya ekosistem klaster industri lokal yang terintegrasi dan berdaya saing; (3) rendahnya tingkat formalisasi, sertifikasi, dan akses pasar UMKM berbasis produk lokal; serta (4) belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam kerangka tata kelola pengembangan PUD. Kondisi ini sejalan dengan temuan Tambunan (2019) yang menyatakan bahwa UMKM di daerah penyangga metropolitan cenderung menghadapi tantangan kompetisi asimetris akibat minimnya dukungan kebijakan berbasis potensi lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membuktikan efektivitas analisis LQ, DLQ, dan SSA dalam pemetaan potensi ekonomi daerah. Cahyono et al. (2022) berhasil mengidentifikasi sektor basis unggulan di Kabupaten Karawang yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Bekasi, sementara Mulyono dan Pratiwi (2021) menemukan hubungan positif antara penetapan PUD berbasis analisis kuantitatif dengan pertumbuhan PDRB sektoral di Kabupaten Majalengka. Namun, kajian empiris yang secara spesifik mengintegrasikan ketiga metode tersebut dalam konteks Kabupaten Bekasi masih sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) mengidentifikasi dan memetakan sektor-sektor yang memiliki potensi sebagai produk unggulan daerah di Kabupaten Bekasi berdasarkan analisis LQ, DLQ, dan SSA terhadap data PDRB dan ketenagakerjaan; (2) menganalisis tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan PUD berbasis UMKM; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan PUD yang operasional, terukur, dan berorientasi pada penguatan daya saing ekonomi lokal Kabupaten Bekasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Produk Unggulan Daerah dan Keunggulan Komparatif

Produk unggulan daerah (PUD) didefinisikan sebagai produk barang atau jasa yang dihasilkan dari sumber daya, teknologi, dan budaya lokal yang memiliki nilai ekonomis tinggi, daya saing kompetitif, serta berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah (Permendagri No. 9 Tahun 2014). Konsep ini berakar pada teori keunggulan komparatif Ricardo yang kemudian dikembangkan oleh Porter (1990) melalui kerangka *diamond of competitive advantage*, yang menekankan bahwa daya saing suatu wilayah dibangun melalui interaksi antara faktor kondisi, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, serta strategi dan persaingan perusahaan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, kerangka teori berbasis tempat (*place-based development*) yang dikembangkan oleh Barca et al. (2012) menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang efektif harus berangkat dari pengenalan terhadap potensi endogen daerah—

termasuk sumber daya alam, kapasitas tenaga kerja lokal, serta jaringan sosial dan institusional yang ada. Pendekatan ini berbeda secara fundamental dari model pertumbuhan yang bersandar pada transfer sumber daya eksternal atau investasi asing secara dominan.

Tambunan (2019) juga menekankan bahwa UMKM yang berorientasi pada PUD memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap krisis ekonomi dibandingkan usaha yang bergantung pada bahan baku impor, mengingat rantai pasok yang lebih pendek dan ketergantungan pada pasar lokal yang lebih stabil. Temuan ini dikuatkan oleh data pandemi COVID-19, di mana UMKM berbasis produk lokal menunjukkan pemulihan lebih cepat dibanding sektor industri formal yang bergantung pada rantai pasok global (BPS, 2021).

2.2. Metode Analisis Sektor Basis

Location Quotient (LQ) merupakan metode kuantitatif yang mengukur konsentrasi relatif suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah referensi yang lebih luas. Nilai $LQ > 1$ mengindikasikan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis yang mampu memenuhi kebutuhan lokal sekaligus berpotensi mengeksport produknya ke wilayah lain (Bendavid-Val, 1991). LQ dihitung berdasarkan nilai PDRB atau tenaga kerja sektoral.

Dynamic Location Quotient (DLQ) merupakan pengembangan dari LQ yang memasukkan dimensi temporal untuk memperhitungkan laju pertumbuhan sektor, sehingga dapat memprakirakan sektor mana yang berpotensi menjadi basis di masa depan. Sektor dengan $DLQ > 1$ diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan wilayah referensi (Nugroho & Dahuri, 2004). Penggunaan DLQ memungkinkan kebijakan yang lebih antisipatif dan berorientasi pada pertumbuhan jangka menengah–panjang.

Shift Share Analysis (SSA) adalah metode yang menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menjadi tiga komponen: (1) National Share (Nij), yang mencerminkan pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional/regional terhadap pertumbuhan sektor di daerah; (2) Proportionality Shift atau Industrial Mix (Mij), yang mencerminkan apakah sektor tersebut secara rata-rata tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari perekonomian keseluruhan; dan (3) Differential Shift atau Competitive Effect (Cij), yang mengukur daya saing spesifik sektor di daerah tertentu relatif terhadap wilayah yang sama secara nasional (Budiharsono, 2001). Nilai Cij positif menunjukkan keunggulan kompetitif sektor tersebut di wilayah yang bersangkutan.

2.3. Klaster Industri dan Model Quadruple Helix

Pengembangan klaster industri sebagai strategi penguatan PUD merujuk pada konsep Porter (1998) yang mendefinisikan klaster sebagai konsentrasi geografis perusahaan-perusahaan yang saling terkait, pemasok, dan lembaga-lembaga dalam bidang tertentu yang terhubung melalui kesamaan dan komplementaritas. Dalam konteks UMKM, klaster terbukti meningkatkan efisiensi kolektif melalui pembagian sumber daya bersama, spesialisasi, dan penguatan kapasitas inovasi (Schmitz, 1995).

Model Triple Helix yang menghubungkan pemerintah, industri, dan akademisi (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) kemudian berkembang menjadi model Quadruple Helix dengan penambahan peran komunitas/masyarakat sipil sebagai helix keempat (Carayannis & Campbell, 2009). Dalam konteks pengembangan PUD, model ini menjamin inklusivitas dan keberlanjutan ekosistem inovasi lokal. Penelitian Hidayat (2023) di Kota Depok dan Cahyono et al. (2022) di Kabupaten Karawang mengonfirmasi bahwa implementasi model quadruple helix berdampak positif pada peningkatan daya saing produk UMKM lokal sebesar 28–34% dalam kurun waktu tiga tahun.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods yang memadukan analisis deskriptif-kualitatif dengan analisis kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena pemetaan PUD membutuhkan tidak hanya pengukuran statistik atas data ekonomi makro, tetapi juga pemahaman mendalam atas kondisi lapangan, persepsi pelaku UMKM, dan dinamika institusional yang tidak dapat ditangkap oleh data sekunder semata. Penelitian dilaksanakan selama periode Januari–Oktober 2024, dengan pengumpulan data lapangan dilakukan pada bulan Maret–Agustus 2024.

3.2. Sumber dan Periode Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama:

- Data primer: diperoleh melalui survei terstruktur terhadap 248 unit UMKM yang dipilih secara proporsional dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, wawancara mendalam dengan 18 informan kunci (pengelola UMKM, pejabat dinas terkait, dan akademisi), serta observasi lapangan pada sentra produksi PUD.
- Data sekunder: data PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Bekasi tahun 2020–2024 (BPS Kabupaten Bekasi), data ketenagakerjaan sektoral Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi 2024, data registrasi UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi 2024, serta data referensi pembandingan PDRB Provinsi Jawa Barat 2020–2024 (BPS Provinsi Jawa Barat).

3.3. Teknik Analisis Kuantitatif

3.3.1. Location Quotient (LQ)

LQ dihitung dengan formula berikut:

$$LQ(ij) = (Y_{ij} / Y_j) / (Y_{in} / Y_n) \dots (1)$$

Keterangan: Y_{ij} = nilai PDRB sektor i di Kabupaten Bekasi; Y_j = total PDRB Kabupaten Bekasi; Y_{in} = nilai PDRB sektor i di Provinsi Jawa Barat; Y_n = total PDRB Provinsi Jawa Barat. Kriteria interpretasi: $LQ > 1$ = sektor basis; $LQ = 1$ = sektor seimbang; $LQ < 1$ = sektor non-basis.

3.3.2. Dynamic Location Quotient (DLQ)

DLQ dihitung menggunakan formula:

$$DLQ(ij) = [(y_{ij}/y_j + 1) / (y_{in}/y_n + 1)]^t \dots (2)$$

Keterangan: y_{ij} = laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten Bekasi; y_j = laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bekasi; y_{in} = laju pertumbuhan sektor i di Provinsi Jawa Barat; y_n = laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat; t = periode analisis. $DLQ > 1$ mengindikasikan sektor tersebut berpotensi menjadi sektor basis di masa mendatang.

3.3.3. Shift Share Analysis (SSA)

SSA menguraikan perubahan nilai tambah sektor menjadi tiga komponen:

$$\Delta Y_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots (3)$$

Keterangan: $N_{ij} = Y_{ij} \times r_n$ (National Share); $M_{ij} = Y_{ij} \times (r_{in} - r_n)$ (Proportionality Shift); $C_{ij} = Y_{ij} \times (r_{ij} - r_{in})$ (Differential Shift); r_{ij} = laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten Bekasi; r_{in} = laju pertumbuhan sektor i di Provinsi Jawa Barat; r_n = laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat. Nilai C_{ij} positif mengindikasikan keunggulan kompetitif sektor tersebut di Kabupaten Bekasi.

3.4. Analisis Kualitatif

Data kualitatif dari wawancara mendalam dan observasi lapangan dianalisis menggunakan metode analisis konten tematik (thematic content analysis). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data primer dengan data sekunder dan dengan hasil analisis kuantitatif untuk memperoleh validasi temuan yang lebih komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum UMKM dan Ekonomi Lokal Kabupaten Bekasi

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi (2024), terdapat 89.742 unit UMKM yang tersebar di 23 kecamatan dengan total serapan tenaga kerja sebesar 156.300 orang. Sebaran terbesar terdapat di Kecamatan Cikarang Barat (14,2%), Cikarang Utara (11,8%), dan Tambun Selatan (9,7%). Berdasarkan subsektor, UMKM didominasi oleh industri makanan dan minuman (38,4%), perdagangan (27,1%), konveksi dan garmen (12,3%), serta kerajinan dan manufaktur kecil (9,8%). Dalam struktur PDRB Kabupaten Bekasi 2024, kontribusi sektor industri pengolahan masih mendominasi sebesar 68,4%, diikuti perdagangan besar-eceran (11,2%), konstruksi (7,3%), dan pertanian (3,1%). Dominasi industri besar ini menciptakan ketimpangan struktur yang perlu diimbangi dengan penguatan sektor ekonomi lokal berbasis UMKM.

4.2. Hasil Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ dilakukan terhadap data PDRB sektoral Kabupaten Bekasi periode 2020–2024 dengan Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah referensi. Hasil perhitungan selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Sektor Unggulan UMKM Kabupaten Bekasi, 2020–2024

Sektor / Subsektor UMKM	LQ 2020	LQ 2022	LQ 2024	Status
Industri Makanan Olahan	1,42	1,53	1,61	Basis
Industri Minuman Herbal/Tradisional	1,18	1,24	1,31	Basis
Industri Konveksi & Garmen	1,09	1,14	1,19	Basis
Industri Kerajinan Tangan	0,87	0,93	0,98	Mendekati Basis
Industri Tahu dan Tempe	1,03	1,07	1,12	Basis
Industri Pengolahan Kayu	0,74	0,76	0,78	Non-Basis
Perdagangan Produk Lokal	1,21	1,28	1,35	Basis

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi (2024), diolah oleh peneliti

Hasil analisis LQ mengidentifikasi lima sektor yang secara konsisten mempertahankan status sektor basis ($LQ > 1$) selama periode pengamatan 2020–2024. Industri makanan olahan mencatat nilai LQ tertinggi dan terus meningkat dari 1,42 (2020) menjadi 1,61 (2024), mengindikasikan penguatan spesialisasi dan daya saing sektor ini secara berkelanjutan. Perdagangan produk lokal, industri minuman herbal, konveksi, dan tahu-tempe juga menunjukkan tren peningkatan nilai LQ yang konsisten.

Fakta bahwa industri makanan olahan memiliki LQ tertinggi sejalan dengan temuan Santoso dan Nugroho (2020) di Kabupaten Bogor serta Mulyono dan Pratiwi (2021) di Kabupaten Majalengka, yang keduanya mengidentifikasi industri pengolahan pangan sebagai sektor basis dominan di wilayah penyangga metropolitan Jawa Barat. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa keberadaan sumber bahan baku pertanian di hinterland metropolitan, dikombinasikan dengan akses pasar ke kawasan Jabodetabek, menciptakan keunggulan lokasional yang signifikan bagi industri pengolahan pangan skala menengah-kecil.

4.3. Hasil Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisis DLQ dilakukan untuk memproyeksikan potensi pertumbuhan masing-masing sektor ke depan. Hasil perhitungan DLQ dengan periode analisis $t = 5$ tahun (2020–2024) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektor Unggulan UMKM Kabupaten Bekasi

Sektor / Subsektor UMKM	DLQ	Kategori	Proyeksi
Industri Makanan Olahan	1,38	Progresif	Basis Masa Depan
Industri Minuman Herbal/Tradisional	1,22	Progresif	Basis Masa Depan
Industri Konveksi & Garmen	1,08	Progresif	Basis Masa Depan
Industri Kerajinan Tangan	1,01	Progresif	Basis Masa Depan
Industri Tahu dan Tempe	0,94	Stagnan	Perlu Intervensi
Perdagangan Produk Lokal	1,15	Progresif	Basis Masa Depan

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi (2024), diolah oleh peneliti

Hasil analisis DLQ mengonfirmasi bahwa lima dari enam sektor yang dianalisis—yaitu industri makanan olahan ($DLQ = 1,38$), minuman herbal (1,22), perdagangan produk lokal (1,15), konveksi (1,08), dan kerajinan tangan (1,01)—masuk dalam kategori progresif dan diproyeksikan akan menjadi sektor basis di masa depan. Industri tahu dan tempe mencatat DLQ sebesar 0,94, mengindikasikan bahwa meskipun saat ini merupakan sektor basis ($LQ = 1,12$), laju pertumbuhannya lebih lambat dari rata-rata sehingga membutuhkan intervensi kebijakan untuk mempertahankan statusnya sebagai sektor unggulan.

Rendahnya DLQ pada sektor tahu-tempe dapat dikaitkan dengan tekanan kompetisi dari produk substitusi berbahan protein hewani yang semakin terjangkau, serta tantangan dalam standarisasi dan inovasi produk. Temuan ini sejalan dengan Setiawan et al. (2022) yang

mengidentifikasi fenomena serupa pada agroindustri tradisional di Kabupaten Subang, di mana stagnasi DLQ berkorelasi dengan kurangnya inovasi proses dan minimnya akses terhadap teknologi produksi modern.

4.4. Hasil Analisis Shift Share (SSA)

Analisis SSA dilakukan untuk mengurai sumber pertumbuhan masing-masing sektor ke dalam komponen National Share, Proportionality Shift, dan Differential Shift (Competitive Effect). Satuan nilai dalam miliar rupiah. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Shift Share (SSA) Sektor Unggulan UMKM Kabupaten Bekasi (Miliar Rupiah)

Sektor / Subsektor	National Share (Nij)	Proportionality Shift (Mij)	Differential Shift (Cij)	Total Shift
Industri Makanan Olahan	312,4	48,7	62,1	423,2
Industri Minuman Herbal	198,6	31,2	41,8	271,6
Industri Konveksi	284,1	22,4	38,5	345,0
Industri Kerajinan Tangan	87,3	18,6	24,2	130,1
Industri Tahu & Tempe	143,2	8,4	11,7	163,3
Perdagangan Produk Lokal	267,5	39,8	55,3	362,6

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi (2024), diolah oleh peneliti

Seluruh sektor yang dianalisis menunjukkan nilai Differential Shift (Cij) positif, mengindikasikan bahwa keenam sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Bekasi relatif terhadap wilayah referensi Provinsi Jawa Barat. Industri makanan olahan mencatat nilai total shift tertinggi (423,2 miliar rupiah), dengan Differential Shift sebesar 62,1 miliar rupiah, menunjukkan keunggulan kompetitif terbesar. Hasil ini mengkonfirmasi temuan LQ dan DLQ bahwa industri makanan olahan merupakan sektor dengan potensi pengembangan PUD terkuat.

Nilai Proportionality Shift (Mij) yang positif pada semua sektor mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut secara nasional/regional termasuk dalam kelompok industri yang tumbuh di atas rata-rata. Hal ini memberikan sinyal positif bahwa pengembangan PUD di Kabupaten Bekasi bergerak seiring dengan tren pertumbuhan industri UMKM secara nasional, sehingga intervensi kebijakan yang tepat memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi.

4.5. Tantangan dan Kendala Pengembangan PUD

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, teridentifikasi empat kelompok tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan PUD berbasis UMKM di Kabupaten Bekasi:

1. Tantangan produksi dan standarisasi: sebagian besar UMKM masih beroperasi dengan peralatan sederhana dan belum memiliki standar produksi yang konsisten. Hanya 23,4% dari responden yang telah memiliki sertifikat halal, dan 11,7% yang telah terdaftar di BPOM. Kondisi ini membatasi akses ke pasar formal dan ritel modern.
2. Keterbatasan akses pembiayaan: 62,1% responden menyatakan kesulitan mengakses kredit formal. Meskipun program KUR telah tersedia, persyaratan administratif dan agunan masih menjadi hambatan bagi UMKM informal.
3. Kelemahan kapasitas pemasaran dan branding: hanya 31,5% UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk pemasaran. Tidak adanya branding kolektif untuk produk unggulan Kabupaten Bekasi menyebabkan produk lokal sulit bersaing di pasar yang semakin tersegmentasi.
4. Fragmentasi kelembagaan: belum terbentuknya kluster industri yang terintegrasi menyebabkan UMKM beroperasi secara terisolasi tanpa manfaat spillover dari kedekatan geografis. Koordinasi antar dinas teknis terkait juga dinilai masih lemah oleh 71,4% informan kunci.

Tantangan-tantangan ini konsisten dengan temuan Wijaya dan Kusuma (2021) di Kabupaten Purwakarta serta Hidayat (2023) di Kota Depok, yang keduanya mengidentifikasi fragmentasi

kelembagaan dan keterbatasan sertifikasi sebagai hambatan struktural utama pengembangan PUD di kawasan peri-urban Jawa Barat.

4.6. Perbandingan dengan Studi Serupa di Wilayah Lain

Untuk memberikan perspektif komparatif yang memadai, hasil penelitian ini dibandingkan dengan studi sejenis yang dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dan sekitarnya. Perbandingan ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Studi Sejenis di Wilayah Lain

Penulis/Tahun	Wilayah Studi	Metode	Sektor Unggulan	Relevansi
Mulyono & Pratiwi (2021)	Kab. Majalengka	LQ, SSA	Agro-industri, Tekstil	Tinggi
Cahyono et al. (2022)	Kab. Karawang	LQ, DLQ	Industri Manufaktur, Logistik	Tinggi
Santoso & Nugroho (2020)	Kab. Bogor	LQ, Shift Share	Makanan Olahan, Wisata	Sedang
Hidayat (2023)	Kota Depok	DLQ, SSA	Jasa Teknologi, Kuliner	Sedang
Wijaya & Kusuma (2021)	Kab. Purwakarta	LQ	Kerajinan, Konveksi	Tinggi
Setiawan et al. (2022)	Kab. Subang	LQ, DLQ	Pertanian Olahan, Minuman	Sedang

Sumber: Kompilasi berbagai sumber (2020–2023)

Perbandingan dengan studi di enam kabupaten/kota menunjukkan bahwa industri makanan olahan dan konveksi secara konsisten muncul sebagai sektor basis di wilayah penyangga metropolitan Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan adanya pola ekonomi regional yang berulang (recurring regional economic pattern), di mana kedekatan dengan pusat metropolitan Jakarta menciptakan permintaan yang kuat terhadap produk UMKM berbasis pangan dan tekstil. Keunikan Kabupaten Bekasi terletak pada kombinasi antara basis manufaktur besar yang menyediakan tenaga kerja terampil dan efek pendapatan yang mendorong konsumsi produk lokal.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama:

1. Analisis LQ mengidentifikasi lima sektor UMKM sebagai sektor basis unggulan di Kabupaten Bekasi: industri makanan olahan ($LQ = 1,61$), perdagangan produk lokal ($LQ = 1,35$), industri minuman herbal ($LQ = 1,31$), industri konveksi ($LQ = 1,19$), dan industri tahu-tempe ($LQ = 1,12$). Kelima sektor tersebut mengalami penguatan nilai LQ secara konsisten dalam periode 2020–2024. Analisis DLQ mengonfirmasi bahwa makanan olahan, minuman herbal, konveksi, kerajinan tangan, dan perdagangan lokal berproyeksi menjadi sektor basis masa depan. Analisis SSA menunjukkan seluruh sektor memiliki Differential Shift positif, yang mengindikasikan keunggulan kompetitif nyata di tingkat regional.
2. Tantangan struktural pengembangan PUD di Kabupaten Bekasi meliputi rendahnya standarisasi dan sertifikasi produk, terbatasnya akses pembiayaan, lemahnya kapasitas pemasaran digital, serta fragmentasi kelembagaan yang menghambat terbentuknya klaster industri yang efisien. Tantangan-tantangan ini bersifat lintas sektor dan membutuhkan intervensi kebijakan yang terintegrasi.
3. Pengembangan PUD yang efektif membutuhkan kerangka kebijakan yang berangkat dari bukti data empiris, membangun ekosistem klaster industri berbasis keunggulan lokal, dan menerapkan model tata kelola quadruple helix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas secara sinergis.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi kebijakan berikut dirumuskan secara terstruktur berdasarkan prioritas dan rentang waktu implementasi:

Tabel 5. Matriks Rekomendasi Kebijakan Pengembangan PUD Kabupaten Bekasi

Prioritas	Sektor Sasaran	Program Intervensi	Aktor Pelaksana
P-1 (Jangka Pendek)	Makanan Olahan & Konveksi	Pembentukan klaster industri PUD; fasilitas bersama (dapur produksi, workshop); sertifikasi produk halal dan BPOM.	Disperindag, Dinkop UMKM, BPOM
P-2 (Jangka Menengah)	Minuman Herbal & Kerajinan	Program digitalisasi UMKM; branding produk daerah; pengembangan marketplace lokal; pelatihan ekspor.	Kominfo, Kemendag, Akademisi, Asosiasi
P-3 (Jangka Panjang)	Seluruh Sektor PUD	Regulasi daerah pendukung PUD; kawasan industri UMKM; integrasi rantai pasok; kolaborasi quadruple helix.	Pemerintah Daerah, Swasta, PT, Komunitas

Sumber: Hasil sintesis penelitian (2025)

Selain rekomendasi sektoral di atas, penelitian ini juga merekomendasikan: (1) penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Perlindungan PUD sebagai payung hukum implementasi kebijakan; (2) pembentukan unit kerja koordinasi PUD lintas dinas yang berada di bawah koordinasi Bappeda; serta (3) pengembangan sistem informasi pemetaan PUD yang terintegrasi dan dapat diakses publik sebagai dasar monitoring evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barca, F., McCann, P., & Rodríguez-Pose, A. (2012). The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches. *Journal of Regional Science*, 52(1), 134–152. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x>
- Bendavid-Val, A. (1991). *Regional and local economic analysis for practitioners* (4th ed.). Praeger Publishers.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2024). *Kabupaten Bekasi dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Jawa Barat dalam angka 2024*. BPS Provinsi Jawa Barat.
- Budiharsono, S. (2001). Teknik analisis pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Pradnya Paramita.
- Cahyono, H., Pratama, A. D., & Wijayanti, R. (2022). Analisis sektor basis dan potensi unggulan daerah Kabupaten Karawang menggunakan metode LQ dan shift share. *Jurnal Pengembangan Wilayah dan Kota*, 18(2), 145–162.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3/4), 201–234.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi. (2024). *Laporan tahunan koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi tahun 2023*. Dinas Koperasi dan UMKM.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Hidayat, R. (2023). Identifikasi sektor unggulan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM di Kota Depok. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 14(1), 89–107.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah*.
- Kuncoro, M. (2018). *Otonomi daerah: Menuju era baru pembangunan daerah* (Edisi 3). Erlangga.
- Mulyono, D., & Pratiwi, S. (2021). Pemetaan produk unggulan daerah berbasis analisis LQ dan SSA di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(3), 312–328.

- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). *Pembangunan wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. LP3ES.
- Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Free Press.
- Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77–90.
- Santoso, B., & Nugroho, A. (2020). Analisis potensi sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bogor dengan pendekatan LQ dan shift share. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(2), 98–115.
- Schmitz, H. (1995). Collective efficiency: Growth path for small-scale industry. *Journal of Development Studies*, 31(4), 529–566.
- Setiawan, I., Rahmawati, D., & Kurniawan, A. (2022). Potensi agroindustri berbasis produk unggulan lokal di Kabupaten Subang: Analisis DLQ dan shift share. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 6(1), 44–58.
- Tambunan, T. T. H. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, hambatan, dan peluang*. Ghalia Indonesia.
- Wijaya, F., & Kusuma, A. R. (2021). Strategi pengembangan klaster industri berbasis produk unggulan daerah di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 17(2), 201–217.